



Ariani Situngkir¹
 Dora Claudia Br.
 Meliala²
 Yessy Yurun Tobing³
 Putri Kemala Dewi
 Lubis⁴
 Khairani Alawiyah
 Matondang⁵

ANALISIS KESESUAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa dokumen laporan keuangan pemerintah daerah serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan secara umum telah mengikuti komponen laporan keuangan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan terutama dalam penyajian informasi yang lebih rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat lebih optimal.

Kata kunci: Laporan Keuangan Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Sektor Publik.

Abstract

This study aims to analyze the conformity of financial statement preparation at the Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan with the Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia as regulated in Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data used in this study are secondary data in the form of regional government financial reports and other supporting documents. Data collection techniques were carried out through documentation and literature studies. The results of the study indicate that the preparation of financial statements at the Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan generally follows the components of financial statements required by Government Accounting Standards, such as the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. However, there are still several aspects that need improvement, particularly in presenting more detailed information in the Notes to the Financial Statements to enhance transparency and accountability in regional financial management.

Keywords: Government Financial Statements, Government Accounting Standards, Public Sector Accounting.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

^{1,2,3,4,5} Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
 email: arianisitungki@gmail.com¹, doraclaudia217@gmail.com², yesyyurun@gmail.com³,
 putrikemala@unimed.ac.id⁴, alawiyah@unimed.ac.id⁵

Pemerintah sebagai pengelola dana publik memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui penyusunan laporan keuangan yang jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak dalam menilai kinerja keuangan serta efektivitas pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah, Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan SAP bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Laporan keuangan pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap komponen laporan keuangan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan pemerintah. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah dalam suatu periode tertentu.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah. Salah satu organisasi perangkat daerah tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, instansi ini mengelola anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi sangat penting.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada instansi pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman terhadap standar akuntansi, serta sistem pengelolaan keuangan yang digunakan dapat memengaruhi kualitas penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini dapat menyebabkan adanya perbedaan antara ketentuan standar yang telah ditetapkan dengan praktik penyusunan laporan keuangan di lapangan.

Selain itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga sering menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan anggaran daerah serta kinerja keuangan instansi pemerintah. Oleh karena itu, analisis terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana penerapan standar tersebut telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai proses penyusunan laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah serta untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki kewajiban dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar tersebut menjadi pedoman utama bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dengan pihak yang terkait atau pihak yang memahami proses penyusunan laporan keuangan pada instansi yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses penyusunan laporan keuangan, sistem pelaporan yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran, dokumen laporan kinerja, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah daerah. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses penyusunan laporan keuangan pada instansi yang diteliti. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen laporan keuangan yang tersedia untuk mengetahui struktur serta komponen laporan keuangan yang disusun oleh instansi tersebut. Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, mengkaji, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan penyusunan laporan keuangan pada instansi yang diteliti dengan ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan seluruh data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilih dan memfokuskan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan.

Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pada instansi yang diteliti serta mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Analisis dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen pendukung lainnya.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, instansi ini mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, instansi ini

memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah.

Penyusunan laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipahami, relevan, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hasil Wawancara (Data Primer)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi sehingga memudahkan proses pencatatan serta pelaporan keuangan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan yang disusun oleh instansi tersebut juga menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang akan diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam mengenai standar akuntansi pemerintahan serta perlunya peningkatan pemahaman mengenai sistem pelaporan keuangan yang digunakan.

Analisis Laporan Realisasi Anggaran (Data Sekunder)

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan pada tahun 2023 sebesar Rp61.080.030.398. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran yang tercatat sebesar Rp53.440.972.812 atau sekitar 87,49% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang sebesar Rp47.598.609.679, maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan realisasi anggaran pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan oleh instansi tersebut berjalan dengan cukup baik.

Menurut ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran harus memuat informasi mengenai anggaran, realisasi, serta selisih antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada instansi yang diteliti telah memuat unsur-unsur tersebut sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Analisis Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen laporan keuangan yang tersedia, diketahui bahwa laporan keuangan yang disusun telah mencakup komponen laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca yang disusun telah memuat informasi mengenai posisi keuangan instansi yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional yang berkaitan dengan pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Sementara itu, Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi mengenai perubahan nilai ekuitas yang terjadi selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai pelengkap laporan keuangan utama yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan serta rincian informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Analisis Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan hasil analisis data primer dan data sekunder yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan secara umum telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang disusun telah mencakup komponen laporan keuangan utama serta telah disajikan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penyajian informasi yang lebih rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan serta

peningkatan pemahaman sumber daya manusia terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan komponen laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

No	Komponen Laporan Keuangan	Ketentuan SAP	Kondisi pada Dispora Kota Medan	Kesesuaian
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).	Menyajikan informasi anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan.	Dispora menyajikan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.61.080.030.398 dengan realisasi Rp.53.440.972.812.	Sesuai.
2	Neraca	Menyajikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas.	Laporan neraca disusun dengan mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode.	Sesuai.
3	Laporan Operasional (LO)	Menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban operasional.	Dispora menyajikan laporan operasional yang menggambarkan aktivitas operasional instansi.	Sesuai.
4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.	Laporan perubahan ekuitas disusun sebagai bagian dari laporan keuangan.	Sesuai.
5	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	Memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi dan rincian laporan.	CaLK disajikan sebagai penjelasan tambahan atas laporan keuangan.	Cukup Sesuai.

Penjelasan Analisis

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat diketahui bahwa komponen laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan secara umum telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia. Setiap komponen laporan keuangan utama seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, serta Laporan Perubahan Ekuitas telah disajikan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Namun demikian, pada Catatan atas Laporan Keuangan masih diperlukan penyajian informasi yang lebih rinci agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, secara keseluruhan penyusunan laporan keuangan pada instansi tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintaha

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan secara umum telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari komponen

laporan keuangan yang telah disusun, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp61.080.030.398 dengan realisasi sebesar Rp53.440.972.812 atau sekitar 87,49% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut berjalan dengan cukup baik.

Selain itu, berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, proses penyusunan laporan keuangan pada instansi tersebut telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta perlunya peningkatan pemahaman mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam penyajian informasi yang lebih rinci serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Jakarta. <https://www.bpk.go.id/id/lhp/laporan-keuangan-daerah>
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7126>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6847>
- Muwarni, A. S., & Astuti, R. P. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik. Jurnal Akuntansi dan Pajak. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7126>
- Nordiawan, D. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. <https://ejournal.arei.or.id/index.php/APKE/article/view/70>
- Pemerintah Kota Medan. (2023). Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun Anggaran 2023. Medan. <https://pemkomedan.go.id/lra-dispora-2023>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-71-tahun-2010>
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2021). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Journal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP). <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6847/0>